

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Implementasi kebijakan publik boleh dikatakan sudah sangat berkembang. Muncul pada tahun 1970-an sebagai bentuk keprihatinan para ilmuwan administrasi publik atas kegagalan berbagai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Federal Amerika Serikat yang dilaksanakan di beberapa negara bagian, studi implementasi pelan tapi pasti mampu membangun kejelasan fokus kajian, metodologi, dan kerangka teori yang dapat digunakan oleh para ilmuwan tersebut dalam menjelaskan berbagai fenomena kegagalan implementasi kebijakan. Setelah tiga generasi terlampau, tantangan untuk melakukan implementasi kebijakan yang mampu menjelaskan fenomena implementasi secara akurat semakin berat untuk dilakukan. Berbagai kritikan mulai bermunculan karena inovasi para peneliti terhadap penggunaan metodologi dan teori dalam melakukan studi implementasi kebijakan publik yang ada sekarang ini dianggap jauh dari memadai.

Ditengah-tengah tantangan tersebut, upaya untuk mengembangkan implementasi kebijakan di Indonesia justru semakin memperoleh relevansinya. Relevansi tersebut berkaitan dengan kebijakan publik di Indonesia yang kontradiktif pasca pergantian regim pada tahun 1998. Disatu sisi, perubahan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia dari sistem politik yang otoriter dan sentralistik menjadi demokratis dan desentralistik telah membuka ruang yang lebar bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan dan program-program pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi politik yang kondusif tersebut tentu sangat mendukung bagi kemunculan kebijakan-kebijakan yang

responsif dan aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun disisi yang lain, bertolak belakang dari apa yang diharapkan, implementasi berbagai kebijakan dan program-program pembangunan oleh pemerintah tersebut hasilnya jauh dari harapan. Kegagalan implementasi tersebut tentu tidak boleh dibiarkan terus terjadi.

Implementasi kebijakan pemerintah merupakan suatu hal yang harus dijalankan secara baik ditunjang dengan berbagai aspek pendukung yang mampu mensukseskan upaya perwujudan implementasi kebijakan tersebut. Penulis akan membahahas salah satu kebijakan yang ada di Indonesia khususnya di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan adanya kebijakan yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Undang-Undang ini dibuat dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional di Indonesia yang memiliki cita-cita luhur seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga dalam prosesnya dapat membentuk sumber manusia yang unggul dan secara otomatis tingkat pengangguran di Indonesia pun dapat di minimalisir sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Agar tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik maka pemerintah pun membuat langkah-langkah kebijakan yang telah disepakati bersama untuk di implementasikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, implementasi kebijakannya perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut apakah implementasi kebijakan itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan atau belum. Kebijakan yang dapat dikatakan berjalan dengan baik jika adanya suatu kerjasama yang baik pula dari semua pihak, baik dari pihak pemerintah yang selaku pelaksana dalam pembuatan kebijakan maupun antar organisasi ke pemerintahannya yang berada di pusat maupun daerah serta masyarakat selaku pengawas dari berjalannya kinerja pemerintah tersebut.

Keinginan untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu upaya dalam mengurangi angka pengangguran, harus didasarkan pada pendekatan yang digerakkan oleh pasar. Target dari pendekatan ini adalah pada penguatan sektor usaha kecil menengah agar bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dengan jumlahnya yang sangat besar. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memainkan peran dinamis yang potensial dalam meningkatkan pasokan baru serta persaingan, menyesuaikan dan mengembangkan teknologi, menciptakan ragam pasar baru, dan meningkatkan kesempatan kerja dan hasil produksi.

Melihat bahwa betapa potensialnya peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penanggulangan tingkat pengangguran kiranya bisa menjadi tolak ukur khususnya untuk Kota Bekasi dalam solusi alternatifnya menanggulangi pengangguran yang ada dalam wilayah pemerintahannya. Berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Bekasi di tahun 2012, dari 2,6 juta penduduk kota Bekasi, terdapat 132 ribu pengangguran. Data itu dikumpulkan Disnakertrans bekerjasama dengan Biro Pusat Statistik (BPS) terdapat 132 ribu pengangguran di tahun 2012. Besarnya angka pengangguran itu menurutnya karena jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan kebutuhan tenaga kerja di kota Bekasi. Rata-rata 1 tahun hanya mampu menyerap 27 ribu tenaga kerja baru. “Banyak yang menganggur, tapi pengangguran tidak mutlak, seperti ada yang bekerja sepekan 2 hari, atau bahkan pekerja serabutan tapi totalnya dari semuanya ada 132 ribu (Nasution, 2013).

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di kota Bekasi masih dalam kategori memprihatinkan. Ironis memang mendengar kata pengangguran dikota yang memang pembangunannya bisa dibilang sudah banyak perkembangan dan sudah bisa dibilang sebagai

kota industri tetapi rakyatnya masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak dan masih terjadi ketimpangan sosial. Hal ini jika dibiarkan secara terus menerus akan berdampak pada perekonomian dilingkungan sekitarnya karena dengan adanya pengangguran produktifitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga menimbulkan kemiskinan dan masalah sosial, tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, salah satu dampak jangka panjangnya adalah menurunnya GNP dan pendapatan perkapita suatu negara. Walaupun demikian kita masih harus tetap optimis masalah angkatan kerja yang tinggi dapat dicarikan solusinya. Salah satu hal yang mungkin bisa dijadikan solusi dari pengurangan angka pengangguran dan perluasan kesempatan kerja adalah dengan mengembangkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Seperti halnya pada negara-negara sedang berkembang khususnya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dimana Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKMM) memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran (Tambunan, 2012:1).

Untuk mempermudah berjalannya sistem pemerintahan di Indonesia agar dalam pencapaian tujuan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, maka pemerintah membuat dan memberlakukan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Pasal 2 ayat 1 tentang otonomi daerah yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah” telah memberikan arah perubahan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah (Rosidin, 2010:84).

Dari penjelasan Undang-Undang diatas dapat disimpulkan bahwa setiap daerah diberikan kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi

kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sekarang pemerintah daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, seperti masa Orde Baru, tetapi lebih dari itu diharapkan dapat menjadi agen penggerak pembangunan di tingkat daerah/lokal. Demokrasi ekonomi di tingkat nasional akan bergerak ke arah yang lebih baik apabila tatanan, instrumen, dan konfigurasi kearifan demokrasi ekonomi lokal lebih dahulu terbentuk. Oleh karenanya, melalui pendekatan akuntabilitas publik yang serumpun dalam cara pandang demokrasi ekonomi apapun yang dibuat oleh pemerintah daerah dapat dengan mudah dinilai oleh masyarakatnya sendiri, apakah kebijakan yang mereka hasilkan bertentangan dengan keinginan masyarakatnya atau tidak. Dengan kata lain, apakah kebijakan tersebut mampu membentuk masyarakat (lokal) ke arah yang lebih baik atau justru membentuk masyarakat ke arah yang lebih buruk. Dari penjelasan Undang-Undang tersebut maka tidak pemerintah daerah khususnya dalam pengaplikasian implementasi kebijakan khususnya mengembangkan sektor Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka penanggulangan pengangguran dapat dijalankan lebih cepat, efektif, dan efisien, baik dalam penyelenggaraan maupun waktu karena pemerintah daerah dalam pengimplementasian kebijakannya tidak harus berurusan langsung dengan keputusan dari pemerintah pusat.

Salah satu upaya serius pemerintah dalam mengembangkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai solusi alternatif untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka penanggulangan angka kemiskinan dan pengangguran adalah membentuk suatu lembaga khusus yang dalam tugas pokok dan fungsinya terkonsentrasi pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi khususnya yang berada di Kota Bekasi merupakan salah satu perangkat Pemerintahan Daerah,

yang merupakan bagian dari suksesor implementasi kebijakan dan pelaksana pembangunan Pemerintah Kota Bekasi, lahir guna membantu pelaksanaan otonomi daerah, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi ini bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, yaitu bertugas lebih mentikberatkan kepada pelayanan publik dalam bidang pelayanan perindustrian perdagangan dan koperasi serta UMKM dalam memperlancar roda perekonomian, mendorong pertumbuhan kota melalui kegiatan jasa dan perdagangan. Pentingnya pelayanan tersebut untuk meningkatkan sentra-sentra industri perdagangan dan koperasi serta UMKM dalam menunjang Visi Kota Bekasi, yaitu BEKASI SEHAT, CERDAS, DAN IHSAN sehingga kesejahteraan masyarakatnya dapat lebih terjamin dan tingkat pengangguran di Kota Bekasi ini pun dapat di minimalisir (Disperindagkop, 2014).

Akan tetapi dalam kenyataan yang ada faktanya angka pengangguran di Kota Bekasi hingga kini masih saja tetap tinggi walaupun pemerintah sudah membentuk lembaga khusus tertentu dalam pencapaian tujuannya yaitu mensejahterakan rakyat khususnya di sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Prosentase Kenaikan UMKM Kota Bekasi

Tahun	Peningkatan	Jumlah UM KM	Jumlah Omzet	Jumlah Ten aga Ker ja	Prosentase Kenaik an UMK M Per Tahun
2011	8432	538	Rp 3.089.449.528.000	62.932	6%
2012	7894	676	Rp 3.084.145.158.000	61.088	9%

2013	7218	843	Rp 3.070.548.668.000	57.120	12%
------	------	-----	----------------------	--------	-----

Sumber: Arsip Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi

Melihat dari data tabel di atas, penulis dapat menemukan beberapa faktor penyebab tidak terlaksananya secara maksimal kebijakan pemerintah yang sudah dibuat dan disepakati bersama, antara lain adalah masih kurangnya sumber daya aparatur yang mumpuni, kurangnya suatu motivasi dari sumber daya aparatur sebagai agen pelaksana kebijakan, kurangnya komitmen pegawai dalam menjalankan dan mensukseskan implementasi kebijakan UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Intensitas komunikasi belum berjalan baik yang diterapkan implementator di Disperindag Kota Bekasi sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam kerjasamanya dengan instansi pemerintahan untuk mewujudkan kesuksesan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Maka dari itu untuk mensukseskan peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Bekasi dalam hal pengimplementasian kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), maka pemerintah dalam teknisnya harus memberikan bekal terhadap aparaturnya sebagai agen dari suksesor pencapaian tujuan tersebut agar sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perannya sebagai solusi alternatif penanggulangan pengangguran dapat berjalan dengan baik sesuai harapan. Pelatihan dan dukungan sarana dan prasarana dibutuhkan dalam mempermudah jalannya implementasi kebijakan ini, dalam hal ini penulis lebih mengkhususkan penelitian terhadap permasalahan dan kendala apa saja yang ada dalam internal organisasi Disperindagkop Kota Bekasi dalam kelompok kerja aparatur pegawai yang mengurus bidang UMKM dalam rangka menjalankan kebijakan UU RI Nomor 20 Tahun 2008.

Bertolak dari penjelasan diatas, kiranya sangat menarik untuk dicermati sebagai bahan pikiran, baik secara praktis maupun teoritis. Mencoba menelaah dan menganalisis bagaimana peran dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam tugasnya mengimplementasikan kebijakan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, apakah kebijakan yang dilaksanakan mampu membentuk masyarakat (lokal) ke arah yang lebih baik sesuai keinginan dan kebutuhannya atau sebaliknya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang seberapa besar peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi mengimplementasikan kebijakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 sebagai upaya perluasan kesempatan kerja sebagai bahan untuk menyusun skripsi dengan judul **“PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA BEKASI”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan awal pengamatan penulis yang sudah diuraikan sebagaimana diatas, terlihat adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang mumpuni;
2. Kurangnya motivasi yang diberikan kepada Sumber Daya Aparatur sebagai agen pelaksana;
3. Kurangnya komitmen pegawai dalam menjalankan dan mensukseskan implementasi kebijakan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM di Disperindagkop Kota Bekasi;

4. Intensitas komunikasi belum berjalan baik yang diterapkan implementator di Disperindagkop Kota Bekasi.

C. Rumusan Penelitian

Untuk dapat memudahkan penelitian ini dan agar penelitian memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi?
2. Bagaimana perluasan kesempatan kerja di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi?
3. Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yang dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi terhadap perluasan kesempatan kerja?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal apa yang akan dituju dari kegiatan penelitian yang akan dilakukan dan penelitian dapat bertujuan untuk menjajaki, menguraikan, menerangkan, dan menguji suatu gejala. Berdasarkan uraian diatas dan berlandaskan pada rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi;
2. Untuk mengetahui perluasan kesempatan kerja di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi;
3. Untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yang dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi terhadap perluasan kesempatan kerja.

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan konsep atau teori-teori tentang ilmu Administrasi Negara pada khususnya dan Ilmu Pengetahuan pada umumnya, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan kepustakaan mengenai implementasi kebijakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu masukan dalam mencari jalan keluar untuk memecahkan permasalahan dan kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

- tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya perluasan kesempatan kerja pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi;
- b. Untuk Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru dalam ilmu pengetahuan mengenai implementasi kebijakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya perluasan kesempatan kerja;
 - c. Untuk Umum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti;
 - d. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan sebagai referensi untuk studi-studi lanjutan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara mendalam.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Solihin Abdul .W (2014) dari bukunya yang berjudul "*Analisis Kebijakan*" mengutip definisi kebijakan publik dari beberapa ahli sebagai berikut:

1. Pakar inggris, W.I Jenkins mendefinisikan kebijakan publik adalah "*A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a spesified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actor to achieve*" (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok

aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut);

2. Chief J. O. Udoji, seorang pakar dari Nigeria (1981), telah mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large”* (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat);
3. Pakar Prancis, Lemieux merumuskan kebijakan sebagai *“The product of activities aimed at the resolution of public problem in the environment by political actors whose relationship are structured. The entire process evolves over time”* (produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu). Dari perbincangan tentang definisi mengenai kebijakan publik diatas, kini kita menyadari bahwa semua kebijakan publik (*public policymaking*) itu akan selalu melibatkan pemerintah, dengan cara tertentu (Wahab, 2014: 15-16).

Menurut William W. Boyer (1964) dalam Keban membagi tahapan dalam proses pembuatan kebijakan ke dalam lima langkah yaitu pembuatan keputusan, programming, komunikasi, kontrol, dan penilaian kembali. Dalam setiap langkah tersebut birokrasi dapat meminimalkan dan mengontrol konflik. Untuk menegakan demokrasi, institusi atau birokrasi dapat mendorong partisipasi dari luar langkah, dan legislatif dalam hal ini dapat memainkan perannya memonitorng proses dan menjamin partisipasi tersebut (Keban, 2008:63).

Menurut Dunn dalam bukunya yang berjudul “*Analisa Kebijakan Publik*” (2003:10), mengartikan kebijakan secara etimologis kebijakan sebagai berikut:

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang berarti “Negara Kota”. Kemudian digunakan dalam bahasa Latin menjadi *Politie*. Pada akhirnya digunakan dalam bahasa Inggris menjadi *policies* yang berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintah.”

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakanyang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (1991:3) yang dikutip oleh Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul “*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*”, yaitu:

“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”

Dalam derajat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* (1983:61) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn dalam buku Leo Agustino dengan judul “*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*” (2013), mendefinisikan implementasi, sebagai: Tindakan-tindakan

yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dari tiga definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Agustino, 2013: 138-139).

Selanjutnya menurut Edward III yang dikutip oleh Santosa dalam bukunya yang berjudul *"Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance"* (2008:41) menyatakan sebagai berikut: *"Is the stage of policy making between the establishment of a policy"* (Implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang krusial dalam studi kebijakan publik).

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang dikutip Dwiyanto Indiahono dalam bukunya yang berjudul *"Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis"* (2009:31) menunjukkan empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah:

1. Komunikasi

Komunikasi yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program atau kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

2. Sumber Daya

Sumberdaya yaitu menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program atau kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program. Karakter yang penting dimiliki implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

Selanjutnya salah satu produk kebijakan pemerintah dalam salah satu langkah tugasnya untuk mensejahterakan rakyat khususnya dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), lahirilah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah tercipta dan berperan sebagai landasan teori dalam pelaksanaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Undang-undang ini juga merupakan payung hukum untuk UMKM dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Terdapat 9 Bab dan 44 pasal dalam Undang-Undang tersebut, setiap bab menjelaskan tentang ketentuan umum dan landasan yang diperlukan dalam menjalankan usaha, seperti asas dan tujuan UMKM serta penumbuhan iklim usaha (UU RI No.20 Tahun 2008).

Dalam situasi krisis, maka persoalan mendasar yang harus dipecahkan adalah bagaimana cara mendorong pelaku usaha kecil bangkit dan menghadapi situasi global. Data menunjukkan bahwa UMKM dapat menunjang perekonomian nasional diantaranya adalah mengatasi pengangguran dan meningkatkan pendapatan negara. Pemberdayaan UMKM hanya akan terjadi secara nyata apabila diberikan kesempatan memasuki kegiatan ekonomi terjamin oleh

pemerintah. Dukungan pemerintah juga diperlukan terutama dalam peningkatan kemampuan untuk memperoleh akses pasar, teknologi dan permodalan yang dikembangkan melalui bank atau non bank. Terbitnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM harus disikapi secara positif, karena itu merupakan salah satu kepedulian pemerintah terhadap UMKM dan menjadi payung hukum yang jelas untuk UMKM (Setiawan, 2012).

Berkaitan dengan kesempatan kerja, peneliti akan mengemukakan definisi mengenai kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah lapangan kerja yang ada dari suatu kegiatan ekonomi (produksi), jadi kesempatan kerja termasuk lapangan kerja yang belum diduduki atau masih lowong. Dengan kata lain kesempatan kerja menunjukkan banyaknya orang yang tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau instansi. Soeharsosno Sagir (1985) berpendapat bahwa kesempatan kerja merupakan kondisi dimana seorang penduduk dapat melakukan kegiatan untuk memperoleh imbal jasa atau penghasilan dalam jangka waktu tertentu; dapat merupakan hambatan atau sumber terhadap ketahanan nasional, jikalau angkatan kerja yang tersedia tidak mampu diserap oleh adanya perluasan kesempatan kerja sebagai prasyarat pembangunan nasional yang berkelanjutan. Paul M. Horvitz dalam Soeharsono Sagir (1982) menyatakan bahwa pengangguran bukan saja merupakan masalah pribadi (mikro), tetapi lebih akan menyangkut masalah makro yang tidak saja akan menjadi pemborosan sumber daya manusia potensial, tetapi pada taraf terakhir akan juga menciptakan kerawanan ketahanan nasional. Kesempatan kerja mampu menampung tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga yang tersedia. Jadi perluasan kesempatan kerja bagi bangsa Indonesia menjadi kebutuhan mendesak.

Swasono dan Sulistyaningsih dalam buku Todaro yang berjudul *“Pembangunan Ekonomi”*, memberi pengertian kesempatan kerja adalah termasuk lapangan pekerjaan yang

sudah diduduki (*employment*) dan masih lowong (*vacancy*). Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut timbul kemudian kebutuhan tenaga kerja yang datang misalnya dari perusahaan swasta atau BUMN dan departemen-departemen pemerintah. Adanya kebutuhan tersebut berarti ada kesempatan kerja bagi orang yang menganggur. Dengan demikian kesempatan kerja (*employment*) yaitu kesempatan kerja yang sudah diduduki.

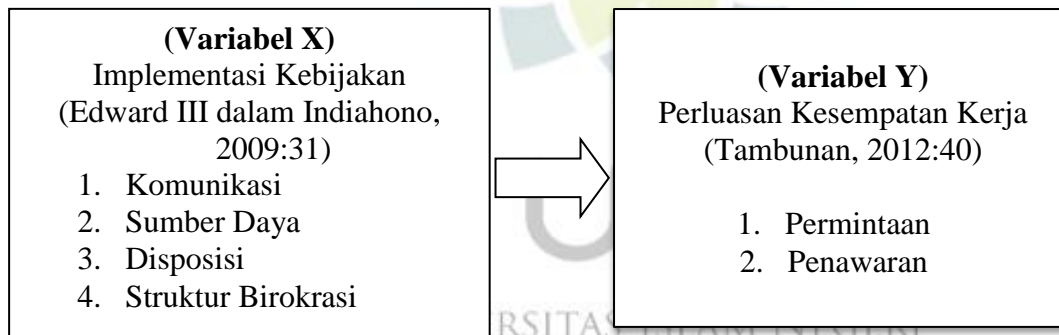
Dari definisi di atas, maka kesempatan kerja dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu:

1. Kesempatan kerja permanen yaitu kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Misalnya adalah orang yang bekerja pada instansi pemerintah atau swasta yang memiliki jaminan sosial hingga hari tua dan tidak bekerja ditempat lain;
2. Kesempatan kerja temporer yaitu kesempatan kerja yang memungkinkan seseorang bekerja dalam waktu yang relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja baru. Misalnya adalah orang yang bekerja sebagai pegawai lepas pada perusahaan swasta dimana pekerja mereka tergantung order (Todaro, 2003:309).

Dari penjelasan diatas mengenai pembahasan implementasi kebijakan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dan perluasan kesempatan kerja sebagai dampak dari kebijakan tersebut. Peneliti ingin mengetahui sudah efektifkah pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Menurut Makmur dalam bukunya yang berjudul "*Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*" (2011:6) menjelaskan yang dimaksud dengan kegiatan yang dilakukan secara efektif dimana dalam proses pelaksanaannya senantiasa menampilkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai. Selain itu, perluasan kesempatan kerja tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang pesat. Menurut

Thulus Tambunan (2012:40) dalam bukunya yang berjudul “*Perekonomian Indonesia*” mengatakan selain pertumbuhan, proses pembangunan ekonomi juga akan membawa dengan sendirinya suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Adapun dari segi kriteria perluasan kesempatan kerja yaitu tingginya permintaan dan penawaran. Dari segi permintaan didorong oleh peningkatan pendapatan dan perubahan pola konsumsi, sedangkan dari segi penawaran didorong oleh perubahan/kemajuan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penemuan-penemuan material baru untuk produksi.

Gambar 1.1
Model Paradigma Penelitian



Sumber: Data yang telah diolah peneliti

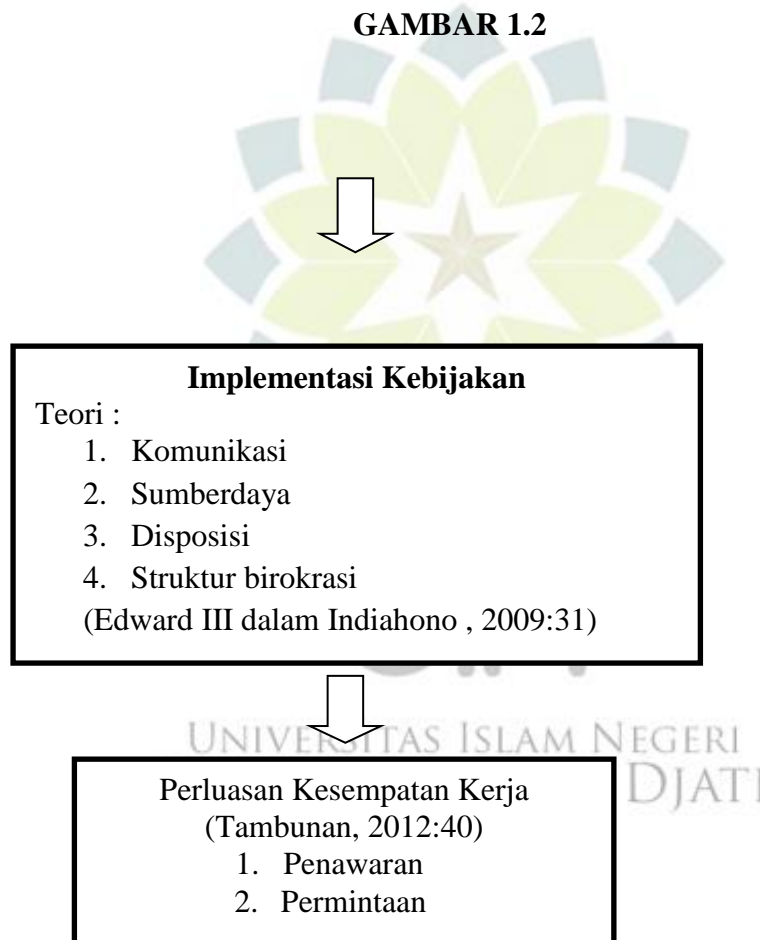
Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran

Permasalahan Implementasi Kebijakan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap perluasan kesempatan kerja di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi

Permasalahan :

1. Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang mumpuni;
2. Kurangnya Motivasi yang diberikan kepada Sumber Daya Aparatur sebagai agen pelaksana;
3. Kurangnya komitmen pegawai dalam menjalankan dan mensukseskan implementasi kebijakan UU No. 20 Th 2008 tentang UMKM di Disperindagkop Kota Bekasi;
4. Intensitas komunikasi belum berjalan baik yang diterapkan implementator di Disperindagkop Kota Bekasi.

GAMBAR 1.2



G. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. (Sugiyono, 2011:64).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas, penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: “Terdapat pengaruh yang signifikan antara Implementasi Kebijakan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM terhadap Perluasan Kesempatan Kerja di Disperindagkop Kota Bekasi”. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis statistik adalah sebagai berikut:

$H_0 : \rho = 0$: tidak terdapat pengaruh implementasi UU No. 20 tahun 2008 terhadap perluasan kesempatan kerja;

$H_a: \rho \neq 0$:terdapat pengaruh implementasi UU No. 20 tahun 2008 terhadap perluasan kesempatan kerja.

